

STRATEGI PARTAI POLITIK UNTUK MENINGKATKAN KETERWAKILAN PEREMPUAN DI DPRD KABUPATEN NGADA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR PADA PEMILU TAHUN 2024

Loisa De Marilak Gendi Kedu
NPP. 30.1142

*Asdaf Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur
Program Studi Politik Indonesia Terapan*

Email : loisademarilakgendikedu@gmail.com

Pembimbing Skripsi : Drs. Maichel Wutoy, MM

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *The dynamics of women's representation in every election always occurs both at the central and regional levels. The 2019-2024 DPRD General Election in Ngada Regency, East Nusa Tenggara Province, shows the lack of female representation. The only one female legislative candidate elected in the election activity was one out of 109 female candidates registered in the Permanent Candidate List with a representation percentage of 4% who had not been able to reach the 30% mark as mandated by law. Purpose: This study aims to formulate inhibiting factors and strategies of political parties to increase women's representation in the 2024 legislative election in Ngada Regency, East Nusa Tenggara Province. Method: This study uses qualitative descriptive methods and uses the concept of neo-ibuisim as an analysis knife. Results: The results obtained from this study are the existence of inhibiting factors that cause political parties to have difficulty in increasing women's representation. These factors include, the low interest of women to enter politics which is influenced by the cultural system of the Ngada community, the economic conditions of female politicians and the process of regeneration of members by political parties that have not been maximized. The strategy used by political parties to increase women's representation in the 2024 elections runs in accordance with the concept of neo-ibuisim. Conclusion: The political party strategy that will be used by the PKB and Nasdem parties in increasing women's representation in the Ngada Regency DPRD in the 2024 elections is to form a patronage-based success team, utilize political party networks, and women-centered approaches by political parties.*

Keywords: *Women's Representation, DPRD, Legislative Elections.*

ABSTRAK

Permasalahan/ Latar Belakang (GAP): *Dinamika angka keterwakilan perempuan dalam setiap gelaran Pemilu selalu terjadi baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah. Pemilihan Umum Anggota DPRD Periode 2019-2024 di wilayah Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur menunjukkan minimnya jumlah keterwakilan perempuan. Calon legislatif perempuan yang terpilih dalam kegiatan pemilu tersebut hanyalah sebanyak satu orang saja dari 109 caleg perempuan yang terdaftar dalam Daftar Caleg Tetap dengan presentase keterwakilan sebesar 4% belum mampu mencapai angka 30% seperti yang diamanatkan oleh undang-undang. Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan faktor penghambat dan strategi partai politik untuk meningkatkan keterwakilan perempuan pada pemilu legislatif tahun 2024 di Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur. Metode : Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan menggunakan konsep neo-ibuisime sebagai*

pisau analisisnya. **Hasil/ Temuan** : Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah adanya faktor penghambat yang menyebabkan partai politik mengalami kesulitan dalam meningkatkan keterwakilan perempuan. Faktor-faktor tersebut meliputi, rendahnya minat perempuan untuk memasuki dunia politik yang dipengaruhi oleh sistem budaya masyarakat Ngada, kondisi ekonomi para politisi perempuan dan proses kaderisasi anggota oleh partai politik yang belum maksimal. Strategi yang digunakan oleh parpol untuk meningkatkan keterwakilan perempuan pada pemilu tahun 2024 berjalan sesuai dengan konsep neo-ibuisme. **Kesimpulan** : Strategi partai politik yang akan digunakan oleh partai PKB dan Partai Nasdem dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Ngada pada pemilu tahun 2024 yaitu membentuk tim sukses berbasis patronase, memanfaatkan jaringan partai politik, serta pendektan yang berpusat pada perempuan oleh partai politik.

Kata Kunci : Keterwakilan Perempuan, DPRD, Pemilu Legislatif.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hak Asasi Manusia (HAM) didefinisikan sebagai hak kodratia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada umat-Nya. Hak ini dimiliki oleh setiap orang sejak lahir. Karena itu HAM harus dilaksanakan bukan hanya sekedar ide dan gagasan tentang nilai-nilai kemanusiaan akan tetapi telah dinormakan sebagai kaidah yang mengikat. Nilai-nilai kemanusiaan yang mengikat tersebut diterapkan baik pada ranah domestik bagi masing-masing negara anggota PBB maupun negara dan pemerintah sebagai subjek hukum internasional sehingga harus dihormati dan dilindungi demi mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan yang secara fitrah dianugerahi oleh Tuhan kepada manusia (Jasin, 2019: 87).

Negara yang diharapkan dapat mewujudkan Hak Asasi Manusia ialah Negara hukum. Negara hukum yang menggunakan sistem demokrasi yaitu negara hukum demokrasi. Sistem demokrasi memberikan kebebasan kepada masyarakatnya untuk ikut terlibat dalam setiap kegiatan politik baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebagai negara demokrasi Indonesia memberi hak demokrasi kepada setiap warganya sebagai pemilih maupun yang dipilih. Hal ini terlihat dalam pelaksanaan pesta demokrasi dalam Pemilihan Umum di Indonesia. Pemilu adalah bentuk partisipasi masyarakat secara luas melalui pemungutan suara, yang memungkinkan masyarakat memiliki kebebasan untuk memilih. Pemilihan Legislatif (DPR, DPD, DPRD) berlangsung dalam pemilihan umum sebagai bentuk representasi itu sendiri.

Kontes politik di pusat seperti pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI dan di daerah seperti pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota/Bupati dan wakilnya, dan DPRD diharapkan terjadi keseimbangan antara laki-laki dan perempuan. Namun pada kenyataannya, partisipasi politik di Indonesia lebih didominasi oleh laki-laki. Ini membuktikan adanya ketidaksetaraan gender dalam bidang politik yang berdampak pada tidak tersalurkan aspirasi perempuan sehingga terjadilah diskriminasi politik berbasis gender yang sampai sekarang pun masih berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Adanya budaya patriarki yang masih mendominasi membuat peran perempuan dalam rana politik menjadi sulit.

Eksistensi perempuan dalam menempati jabatan strategis di pemerintahan sangat diperlukan untuk meningkatkan angka keterwakilan perempuan dalam menempati jabatan-jabatan publik termasuk posisi anggota legislatif. Namun yang terjadi sampai saat ini angka keterwakilan perempuan di lembaga legislatif masih rendah walaupun tiap periode angka keterwakilan perempuan ada yang meningkat namun belum mencapai target yang diharapkan. Selain itu jika perempuan terwakili di tingkat lokal maka akan mencegah kebijakan anti-perempuan yang diberlakukan oleh pemerintah daerah. Penguatan politik identitas di tingkat

lokal sebagai dampak kebijakan otonomi daerah berpengaruh positif terhadap seluruh kebijakan pemerintah daerah, termasuk yang menyangkut pemberdayaan perempuan.

Dari data yang diperoleh dapat diketahui bahwa keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ngada belum mencapai angka 30%. Jumlah keterwakilan perempuan dalam empat periode pemilu legislatif terbanyak pada periode 2014-2019 yaitu sebanyak 20%. Jumlah anggota DPRD saat itu yang terpilih sebanyak 30 orang dan lima orang adalah anggota DPRD perempuan. Namun pada pemilu legislatif periode 2019-2024 jumlah anggota perempuan yang terpilih mengalami penurunan secara signifikan sebesar 16% menjadi satu orang dari 25 anggota DPRD yang terpilih atau sebanyak 4%.

Partai politik merupakan alat atau instrumen untuk meraih kekuasaan, logika demokrasi modern; bagi siapa saja yang ingin menjadi penguasa, bupati/walikota, gubernur, presiden, dan anggota parlemen, ia harus masuk ke dalam jejaring partai politik itu. Dalam konsepsi demokrasi modern, dalam memperjuangkan kepentingannya, kaum perempuan tentu memerlukan wadah sebagai sarana perjuangan, dan wadah tersebut tak lain adalah partai politik (Hiplunudin, 2017 :43). Partai politik sebagai wadah atau alat untuk mengusahakan hak-hak perempuan dalam bidang sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Sehingga diharapkan partai politik menjadi alat untuk meraih kekuasaan, merumuskan kebijakan umum yang peka gender, serta mengakomodir hak dan kewajiban perempuan di ranah negara.

Oleh karena akan menarik untuk mengkaji strategi dan kebijakan partai politik dalam meningkatkan keterwakilan perempuan dalam rangka memenuhi kuota 30% dalam pemilihan umum tahun 2024. Karena tinggi rendahnya angka keterwakilan perempuan di suatu daerah juga bergantung dan erat kaitannya dengan kebijakan yang diterapkan oleh para elit atau pengurus partai politik di wilayah tersebut. Pada tahun 2024 Indonesia akan menyelenggarakan pemilu serentak baik untuk legislatif tingkat pusat maupun tingkat daerah. Mengingat Kabupaten Ngada merupakan salah satu daerah yang ikut menyelenggarakan pemilu legislatif, maka memiliki landasan kepentingan yang signifikan terkait dengan partisipasi perempuan yang dapat dijadikan sebagai poin-poin penting dalam penelitian ini.

Penulis akan meneliti dua partai terkait dengan keterwakilan perempuan dalam Pemilu 2024 yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) karena selama dua periode ada keterwakilan perempuan di legislatif dan Partai Nasioanal Demokrasi (NasDem) karena periode pemilu 2014 menjadi partai dengan keterwakilan perempuan terbanyak, namun pada tahun 2019 tidak ada sama sekali.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Menjelang pendaftaran DSC (Daftar Calon Sementara), partai politik tertentu mulai sibuk mencalonkan perempuan dalam daftar caleg yang diambil tanpa proses kaderisasi agar bisa memenuhi syarat undang-undang. Ini merupakan salah satu contoh realita politik karbitan ala partai politik. Oleh karena itu pada kenyataannya yang terjadi di lapangan pada saat pemilihan umum, anggota dewan perempuan yang terpilih masih rendah dari kuota 30% yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Seharusnya untuk memenuhi kuota tersebut kader perempuan harus dibekali dengan kemampuan dan keahlian sehingga siap menjadi anggota legislatif yang bertanggung jawab. Pada pemilu periode 2019-2024 jumlah calon legislatif perempuan di DPRD Kabupaten Ngada lebih tinggi dari pada periode 2014- 2019 yakni sebanyak 109 calon legislatif perempuan yang mendaftar namun yang terpilih hanya satu orang perempuan dari partai PKB.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian dengan tema yang penulis angkat dalam tulisan ini sudah banyak dilakukan oleh para peneliti-peneliti terdahulu. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Maria Madur (2022). Peneliti tersebut melakukan penelitian berkaitan dengan politik dan perempuan di Kabupaten Ngada dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Akan tetapi penelitian tersebut berfokus pada faktor penghambat keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Ngada. Ada juga penelitian lain yang dilakukan oleh Yuni Lestari,dkk. (2019) dan Jenniper Silaban (2020). Keduanya sama-sama mengkaji tentang strategi partai politik untuk meningkatkan keterwakilan perempuan tetapi penelitian ini lebih berfokus pada pemilu yang telah terjadi pada tahun 2019. Penelitian ini memfokuskan aspek penelitiannya pada tahapan penyusunan strategi partisipasi partai politik yang komprehensif guna meningkatkan kuota keterwakilan perempuan dengan menggunakan metode kualitatif. Selain itu, terdapat kajian lainnya yang membahas tentang Upaya Partai Politik dalam Memenuhi Kuota 30% Keterwakilan Perempuan yang dilakukan oleh Ahmadza Mustaqim (2018). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dan memfokuskan penelitiannya hanya pada strategi-strategi yang dibuat oleh partai politik dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Ngada pada pemilihan umum di lingkup nasional tahun 2024 yang akan datang.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana penelitian yang diangkat oleh penulis belum banyak dilakukan karena penelitian ini bersifat lokal dengan latar belakang sosial dan kebudayaan yang berbeda. Pada penelitian ini penulis melakukan kajian pada. Penulis juga lebih memfokuskan penelitian pada strategi-strategi yang dibuat oleh partai politik dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Ngada pada pemilihan umum di lingkup nasional tahun 2024 yang akan datang. Bersamaan dengan itu penelitian ini juga hendak mengkaji perihal faktor-faktor yang menghambat partai politik dalam meningkatkan keterwakilan perempuan.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan faktor penghambat dan strategi partai politik untuk meningkatkan keterwakilan perempuan pada pemilu legislatif tahun 2024 di Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan penalaran induktif untuk memahami fenomena mengenai apa yang dialami subyek penelitian secara menyeluruh dengan cara deskripsi dalam bentuk kata kata serta Bahasa, pada konteks khusus yang dialami dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2018:6). Tujuannya agar penulis dapat merumuskan secara ilmiah, faktor-faktor yang menghambat dan strategi-strategi yang disiapkan oleh partai politik untuk meningkatkan jumlah keterwakilan perempuan pada Pemilu Legislatif Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024. Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, dan dokumentasi. Penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 7 orang informan yang terdiri dari:

1. Anggota DPRD perempuan tunggal Kabupaten Ngada Periode 2019-2024
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Ngada
3. Ketua Partai Kebangkitan Bangsa wilayah Bajawa
4. Ketua partai Nasional Demokrasi wilayah Bajawa

5. Mantan Peserta Pemilu Legislatif Kabupaten Ngada Periode 2014-2019
6. Mantan Peserta Pemilu Legislatif Kabupaten Ngada Periode 2019-2024
7. Pemilih Pemula Kabupaten Ngada

Penulis akan melakukan analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2014:246). Reduksi data pada penelitian ini akan dilakukan dengan cara merangkum seluruh informasi yang berhubungan dengan strategi partai politik dalam meningkatkan keterwakilan perempuan, dalam hal ini strategi yang ditetapkan menyongsong pemilu legislatif tahun 2024 oleh partai politik . Hasil rangkuman tersebut kemudian diseleksi (eliminasi) berdasarkan kriteria yang lebih penting. Hal-hal penting tersebutlah akan menjadi fokus penelitian yang selanjutnya akan penulis gambarkan secara jelas. Adapun teknik penyajian data akan dilakukan melalui penarikan kesimpulan yang diperoleh dari lapangan dalam bentuk uraian singkat, bagan, 6 hubungan antarinforman, flowchart, dan sejenisnya yang berkaitan dengan strategi partai politik untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Ngada dalam pemilihan umum legislatif tahun 2024 tersebut. Selanjutnya untuk penarikan kesimpulan akhir akan dilakukan dengan cara menjadikan hasil kajian data sebagai kesimpulan akhir yang didukung oleh data-data dan menetapkan kesimpulan awal sebagai kesimpulan akhir dengan catatan jika tidak terdapat perubahan yang signifikan di lapangan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis strategi-strategi untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Ngada pada Pemilu tahun 2024 yang disiapkan oleh partai politik khususnya Partai PKB dan Partai Nasdem berdasarkan teori Neo-Ibuisme yang dikemukakan oleh Ichsan Kabullah & Fajri. Konsep ini ditemukan oleh Ichsan Kabullah dan Fajri yang melakukan penelitian tentang terpilihnya sejumlah istri kepala daerah menjadi anggota DPRD di Sumatra Barat pada tahun 2019. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa strategi electoral kandidat perempuan yaitu tim sukses berbasis patronase, jaringan partai politik, pendekatan yang berpusat pada perempuan. Dari konsep neo-ibuisme inilah ditemukan beberapa fakta di lapangan.

3.1 Faktor Penghambat Partai politik untuk Meningkatkan Keterwakilan Perempuan

Penulis melakukan wawancara dengan para pemimpin partai mengenai hambatan yang dihadapi dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di dalam partai politik dan badan legislatif.

1. Minat Perempuan untuk Memasuki Dunia Politik

Minat perempuan merupakan suatu indikator yang menjadi penyebab bagi partai politik dalam melibatkan Wanita dalam dunia politik. Pemilihan umum anggota legislatif Kabupaten Ngada tahun 2019 yang diikuti oleh 109 (seratus Sembilan) caleg perempuan hanya menghadirkan 1 orang perempuan di Lembaga DPRD Kabupaten Ngada. Hal ini terindikasi sebagai dampak dari adanya sistem patriarki dalam lingkup wilayah Kabupaten Ngada. Berdasarkan wawancara tersebut penulis memperoleh suatu pemahaman bahwa masyarakat di wilayah Kabupaten Ngada khususnya kaum perempuan memiliki minat yang sangat rendah juga akibat pengaruh sistem budaya patriarki untuk terjun ke dalam dunia politik apalagi menjadi calon anggota DPRD Kabupaten Ngada.

Isitilah patriarki berhubungan dengan suatu sistem sosial yang menempatkan laki-laki dalam peran kepemimpinan, otoritas moral dan hak sosial. Sedangkan budaya patriarki berarti suatu sistem kebudayaan yang menempatkan laki-laki sebagai

pemegang kekuasaan dalam komunitas adat (suku) dan mendominasi dalam peran kepemimpinan serta otoritas moral dan hak sosial di suatu wilayah adat tertentu. Penyebab utamanya budaya patriarki, masyarakat Ngada masih menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan dan tokoh utama dalam setiap peristiwa penting yang terjadi di lingkungan masyarakat. Hingga saat ini belum ada pernah ditemui adanya sosok perempuan yang diberikan kepercayaan oleh masyarakat untuk menjadi tokoh penting atau pemuka adat dalam lingkungan budaya masyarakat Ngada.

Oleh karena itu menjadi hal yang wajar apabila keterwakilan perempuan pada pemilu legislatif Kabupaten Ngada periode 2019-2024 belum maksimal. Hal tersebut dikarenakan dari dalam diri kaum perempuan belum mempunyai minat dalam dunia politik sekalipun kehadiran kaum perempuan itu sendiri sama-sama dibutuhkan dalam dunia politik layaknya kaum laki-laki. Dari hasil analisis di atas, penulis kemudian menyimpulkan bahwa minimnya keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Ngada karena rendahnya minat dari kaum perempuan itu sendiri. Bahwasannya rendahnya minat tersebut karena pandangan-pandangan yang mengharuskan perempuan untuk mengurus rumah tangganya saja. Rendahnya minat dari kaum perempuan ini sendiri dikarenakan masih belum adanya wawasan politik yang membuat pikiran menjadi terbuka, tentang pentingnya kedudukan perempuan di kursi legislatif.

2. Kondisi Ekonomi para Politisi Perempuan di Kabupaten Ngada

Kondisi ekonomi umumnya juga menggambarkan keadaan seseorang atau kelompok orang dalam suatu lingkungan berdasarkan aktivitas ekonomi, pendapatan seseorang, pekerjaan dan kemampuan memenuhi kebutuhan hidup. Dalam kaitannya dengan usaha partai politik dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, penting bagi para politisi perempuan peserta pemilu legislatif, untuk memperhatikan aspek kondisi ekonomi. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan pemilu legislatif biaya yang dikeluarkan para caleg untuk tahapan pemilu terbilang sangat besar, mulai dari biaya pendaftaran peserta pemilu, kebutuhan kampanye, sampai pada biaya yang harus dikeluarkan untuk kebutuhan pencoblosan.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis menemukan bahwa politisi perempuan yang mendaftar sebagai calon anggota DPRD pada pemilu legislatif sebagian besar dari orang-orang yang sudah berkeluarga dengan pekerjaan tetap sebagai pelaku usaha, kelompok tani dan ternak serta ibu rumah tangga. Sebagai caleg kondisi ekonomi dan status dalam keluarga menjadi salah satu hambatan terbesar bagi partai politik dalam meningkatkan keterwakilan perempuan karena dalam pencalonan para caleg harus memilih antara mengeluarkan biaya untuk kebutuhan hidup keluarga atau untuk kepentingan pemilu.

Dengan demikian wajar apabila banyak caleg perempuan yang mendaftar namun sedikit yang terpilih dalam pemilu legislatif. Hal tersebut dikarenakan adanya hambatan dari segi pendanaan baik dari partai politik dan caleg perempuan itu sendiri yang mempengaruhi partisipasi perempuan dalam kegiatan pencalonan. Berdasarkan analisis ini dapat disimpulkan bahwa salah satu faktor penghambat partai politik untuk meningkatkan keterwakilan perempuan politisi perempuan ialah pengaruh dari kondisi ekonomi para politisi perempuan di Kabupaten Ngada yang mana karena alasan pekerjaan rumah tangga membuat banyak caleg perempuan di Kabupaten Ngada memilih untuk tidak mengeluarkan biaya dalam kegiatan pemilu legislatif.

3. Kaderisasi Anggota oleh Partai Politik

Salah satu fungsi partai politik ialah rekrutmen politik. Rekrutmen politik berfungsi untuk mengajak dan mencari anggota yang memiliki minat, bakat dan mau turut serta dalam perpolitikan dalam negeri serta mempunyai keinginan untuk

memperluas partisipasi politik masyarakat. Melalui rekrutmen partai politik memiliki anggota yang ikut bergabung dalam partai politik baik perempuan maupun laki-laki. Setelah melalui rekrutmen menjadi anggota partai politik, kemudian agak disiapkan untuk menjadi seorang pemimpin melalui proses kaderisasi.

Perempuan Ngada yang telah direkrut menjadi anggota partai politik adalah kader-kader yang dipersiapkan untuk menjadi wakil rakyat sehingga kegiatan rekrutmen politik harus dilakukan secara baik dan benar. Setelah melakukan proses rekrutmen anggota partai politik, maka akan dilanjutkan pada proses kaderisasi. Kaderisasi diartikan sebagai proses seleksi kader. Kader adalah sumber daya manusia sebagai calon anggota yang disiapkan dalam suatu organisasi melalui beberapa tahapan proses seleksi yang dilatih dan dipersiapkan untuk suatu keterampilan atau disiplin ilmu.

Dari hasil wawancara di atas dapat penulis simpulkan bahwa kader perempuan di dalam suatu parpol menentukan dari daya jual partai politik di masyarakat. Jika pola rekrutmen dan mekanisme kaderisasi baik akan menghasilkan kader perempuan yang berkualitas dan berkapabilitas pula, begitu pun sebaliknya. Dihasilkannya kader-kader perempuan yang berkualitas dan berkapabilitas tentu akan menyorot partai politik asal kader perempuan tersebut muncul.

Jadi, kualitas kader-kader perempuan yang ada dalam partai politik sangat dipengaruhi oleh pola rekrutmen dan mekanisme kaderisasi partai tersebut. Dapat dibayangkan jika partai politik sebagai sumber pemimpin nasional tidak memiliki pola rekrutmen dan mekanisme kaderisasi yang baik menjelang Pemilu Tahun 2024, tentu ini akan memunculkan berbagai persoalan, yang salah satunya ditunjukkan dengan menurunnya angka keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Ngada.

3.2 Strategi Partai Politik dalam Meningkatkan Keterwakilan Perempuan

1) Membentuk Tim Sukses Berbasis Patronase

Tim sukses berbasis patronase ialah suatu tim sukses hasil dari penyaluran daya material untuk tujuan tertentu dan memberikan manfaat politik, dan secara khusus, sumber daya material didistribusikan melalui jaringan klientelistik yang berbasis pada relasi kekuatan personal (Widoyoko, 2018). Klientisme adalah istilah untuk sistem politik yang didasarkan pada hubungan klien dengan patron, klien memberikan dukungan politik atau keuangan kepada patron baik dalam bentuk suara atau material dan kemudian patron membalas dengan memberikan imbalan beberapa hak istimewa atau manfaat khusus.

Permasalahan minimnya anggota masyarakat khususnya perempuan yang ingin dan siap untuk berkiprah dalam politik dan maju mencalonkan diri menjadi calon anggota legislatif melalui partai politik hingga mencari kader-kader aktif perempuan yang siap bertarung dalam kontestasi politik seperti Pemilu legislatif menjadi salah satu alasan partai politik menggunakan cara atau upaya yakni dengan memanfaatkan tim sukses berbasis patronase untuk memenuhi kuota 30% angka keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif. Tim sukses berbasis patronase mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi kandidat perempuan. Dengan adanya tim sukses berbasis patronase ini maka akan membangun kepercayaan masyarakat terhadap calon kandidat perempuan.

2) Memanfaatkan Jaringan Partai Politik

Partai politik mau tidak mau harus melibatkan perempuan dalam setiap agenda kegiatan politiknya juga sebagai bentuk dari manifestasi pro gender seperti yang

diamanatkan oleh Undang-Undang. Partai politik juga mempunyai tanggung jawab membimbing kaum perempuan untuk duduk sebagai anggota legislatif sehingga dapat menyuarakan aspirasi perempuan. Tantangan itulah yang kemudian saat ini sedang coba dijawab oleh para elit partai politik di daerah yakni bagaimana caranya untuk mendongkrak angka keterwakilan perempuan di lembaga legislatif agar para kaum perempuan terus mampu menunjukkan eksistensi dan kiprahnya lebih banyak di ranah pengambil kebijakan seperti lembaga legislatif ditingkat daerah.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh partai politik di Kabupaten Ngada dalam rangka memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan dalam pencalonan legislatif serta sebagai upaya dalam meningkatkan angka keterwakilan perempuan ialah dengan mengoptimalkan peran dan fungsi dari organisasi sayap yang memiliki fokus dibidang perempuan yang dimiliki oleh partai politik.

Perempuan yang menjadi calon legislatif tentu harus memiliki kompetensi yang dapat mendukung partai politik yang mengusungnya agar jaringan luas yang telah dibuat oleh partai politik dapat mempercayainya. Kaum perempuan yang ingin menjadi kandidat partai dalam pemilihan umum perlu memenuhi beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Kriteria itu seperti mampu membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat, terlibat dalam struktur organisasi partai, mampu menjadi pemimpin dan berjiwa pemimpin dalam suatu organisasi, memiliki kesiapan secara fisik, material dan mental untuk menjadi anggota dewan dan yang sudah berkeluarga harus mengantongi ijin suami.

3) Pendekatan yang Berpusat pada Perempuan oleh Partai Politik

Pendekatan yang berpusat pada perempuan oleh partai politik dapat diwujudkan baik dari partai politik sendiri maupun organisasi sayapnya. Pendekatan itu dilakukan lewat kegiatan-kegiatan yang berpusat kepada perempuan atau kegiatan yang berorientasi dari atau untuk perempuan.

Menurut penulis partai politik harus mendukung perempuan mencapai keterwakilan dalam kursi legislatif dengan menjembatani kader perempuan melalui kegiatan-kegiatan agar keterampilan dan pengetahuan para kandidat meningkat sehingga akan mendapat dukungan dari perempuan lainnya. Kader perempuan harus berani dalam menyampaikan peningkatan kualitas hidup perempuan di masyarakat, menyuarakan emansipasi wanita dalam berbagai bidang dan kesetaraan gender lainnya. Hal ini yang akan menarik perhatian publik khususnya kaum perempuan.

3.3 Temuan Utama Penelitian

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, penulis kemudian merumuskan beberapa temuan penelitian terkait strategi partai politik untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Ngada pada Pemilu Tahun 2024. *Pertama*, untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Ngada pada Pemilu Tahun 2024 Parpol khususnya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Nasional Demokrasi (NasDem) padanya umumnya mempunyai strategi yang sama seperti konsep neo-ibuisme. Namun kedua partai politik ini juga mengalami beberapa hambatan seperti penyebab minimnya anggota masyarakat khususnya perempuan yang ingin dan siap untuk berkiprah dalam politik dan maju mencalonkan diri menjadi calon anggota legislatif melalui partai politik hingga mencari kader-kader aktif perempuan yang siap bertarung dalam kontestasi politik seperti Pemilu legislatif karena kurangnya minat dari kaum perempuan sendiri yang disebabkan juga karena system budaya di Kabupaten Ngada oleh karena itu partai politik menggunakan cara atau upaya yakni

dengan memanfaatkan jaringan kekerabatan untuk memenuhi kuota 30% angka keterwakilan perempuan dalam keanggotaan partai politik dan dalam pencalonan legislatif.

Kedua, pengkaderan yang dilakukan oleh partai politik PKB dan NasDem belum berjalan dengan baik sehingga ketika momentum politik seperti Pemilu legislatif datang partai politik masih harus kerepotan dalam mencari dan menjaring kader ataupun calon yang kompeten dan berkualitas dan yang paling penting adalah siap bertarung dalam Pemilu legislatif. Karena fakta dilapangan yang terjadi di Kabupaten Ngada adalah banyak tokoh-tokoh perempuan dari anggota masyarakat yang sebenarnya mereka memiliki kompetensi dan kualitas namun tidak siap bertarung dalam Pemilu legislatif dikarenakan banyak faktor serta alasan yang melatarbelakanginya.

Fakta tersebut tentu menjadi ironi ketika kondisi dan ruang politik di daerah khususnya di Kabupaten Ngada membutuhkan kehadiran perempuan di lembaga-lembaga strategis pengambil kebijakan seperti DPRD namun yang terjadi justru para kelompok perempuan enggan untuk masuk dan terlibat masuk ke dalam proses politik tersebut sehingga lagi-lagi perempuan harus menjadi kelompok yang minoritas dalam lembaga strategis pengambil kebijakan seperti DPRD. Akibatnya dengan proporsi jumlah yang sangat minimum tersebut dengan hanya berjumlah satu orang di lembaga legislatif di Kabupaten Ngada para anggota DPRD perempuan tersebut seolah-olah hanya menjadi pelengkap saja ditengah lingkungan politik yang didominasi oleh kaum laki-laki.

Ketiga, Partai politik hanya karena demi untuk memenuhi persyaratan regulasi yakni kuota 30% keterwakilan perempuan dalam pencalonan serta kepengurusan partai politik hanya asal merekrut kader perempuan yang bersedia untuk dicalonkan dalam Pemilu legislatif tanpa memperhatikan kompetensi serta kualitas sumber daya manusia yang bersangkutan. Karena sekali lagi kehadiran perempuan dalam lembaga strategis seperti DPRD tersebut bukan hanya sebagai pelengkap ataupun syarat terwakilinya secara simbolis kelompok perempuan dalam lembaga tersebut, namun lebih jauh lagi mereka harus mampu dalam mengartikulasikan serta memperjuangkan apa yang menjadi kebutuhan serta kepentingan dari kelompok yang mereka wakili untuk dapat diakomodasi ke dalam sebuah agenda kebijakan yang pro terhadap perempuan.

Untuk itulah calon legislatif perempuan yang berkualitas disini menjadi penting agar partai politik tidak terkesan asal rekrut ataupun sekedar pasang nama demi memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan ketika pencalonan legislatif dalam Pemilu ataupun kepengurusan partai politik. Karena mengingat begitu pentingnya kehadiran serta peran mereka dalam lembaga legislatif DPRD Kabupaten Ngada. Sehingga kemudian sistem serta pola kaderisasi khususnya bagi kelompok perempuan dalam partai politik menjadi suatu hal yang penting untuk diperhatikan oleh para elit partai di daerah dalam rangka membentuk kader perempuan partai politik yang memiliki kualitas serta kompetensi untuk kemudian dicalonkan menjadi anggota legislatif dalam Pemilu legislatif tahun 2024.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa faktor penghambat partai politik untuk meningkatkan keterwakilan perempuan pada pemilihan umum tahun 2024 di DPRD Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu rendahnya minat perempuan di Kabupaten Ngada untuk terjun ke dunia politik karena pengaruh dari budaya patriarki di Kabupaten Ngada, masalah *financial* atau modal ekonomi para perempuan yang ingin maju dalam pemilu legislatif dan proses kaderisasi partai politik yang tidak berjalan dengan baik.

Strategi partai politik yang akan digunakan dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Ngada yaitu: membentuk tim sukses berbasis patronase, memanfaatkan jaringan partai politik dan pendekatan yang berpusat pada perempuan oleh partai politik.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu penelitian. **Arah Masa Depan Penelitian (*future work*)** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian selanjutnya terkait keberhasilan dari strategi yang dibuat partai politik khususnya partai PKB dan NasDem untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Ngada pada pemilu 2024.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Ngada, Seluruh Politisi Perempuan di wilayah Kabupaten Ngada, Segenap Ketua Dewan Pimpinan Cabang atau Daerah dari seluruh partai politik yang berada di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Ngada dan semua pihak yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian dan membantu penulis dalam menyukkseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

- Aditya; et al . (2019). *Tata Kelola Pemilu Di Indonesia*. Jakarta: KPU RI. Akbar, I. 2018. *Politik Etnis Tionghoa di Indonesia*. Yogyakarta : Suluh Media.
- Arifin, A. 2014. *Pencitraan Politik*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Asshiddiqie, Jimly. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Budiarjo, M. 2013. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama. Djuyandi, Y. 2017. *Pengantar Ilmu Politik*. Rajawali Pers.
- Handayono 2017. *Pendidikan Politik*. Pohon Cahaya. Hiplunudin, A. 2017. *Politik Gender*. Yogyakarta : Calpulis
- Jasin, J. 2019. *Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta : Deepublish
- Mohtar, MacAndrews. 2021. *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
- Setiawan, dkk. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat : CV Jejak
- Suprihantini, A. 2019. *Partai Politik di Indonesia*. Klaten : Cempaka Putih Suryakusuma, J. 2011. *Ibuisme Negara*. Komunitas Bambu
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono 2020. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*: Alfa Beta Bandung. Yusuf, M. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta : Prenada Media Group.

B. Sumber Jurnal

- Adriani, Rekho, dkk. 2019. Analisis Keterwakilan Perempuan di DPRD Seluma (Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik, Volume 1, Nomor 1, (September 2019)
- Andani, Melna. 2019. *Rekrutmen Dan Kaderisasi Calon Legislatif Perempuan Pada Pemilihan Umum 2019 Oleh Partai Keadilan Sejahtera*. Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Volume 6 Nomor 3, (Tahun 2016).
- Artina, Dessy. 2016. *Keterwakilan Politik Perempuan dalam Pemilu Legislatif Provinsi Riau Periode 2014-2019*. Jurnal Hukum IUS QUIAIUSTUM, Volume 23 Nomor 1, (23 Januari 2016).

- Hadiati, Teti, dkk. 2022. *Enforcement of Norms of Women's Representation in The Regional House of Representatives of Pekalongan Regency, Period 2019-2024*, *Asian Journal of Law and Humanity*, Volume 2 Nomor 1, (Tahun 2022).
- Kabullah, Ichsan, dkk. *Neo-Ibuism in Indonesian Politics: Election Campaigns of Wives of Regional Heads in West Sumatra in 2019*. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, Volume 40 Nomor 1.
- Lestari, Yuni, dkk. 2019. *Formulasi Strategi Partisipasi Partai Politik dalam Meningkatkan Keterwakilan Perempuan pada Pemilu 2019*. *Journal of Gender and Children Studies*, Volume 1 Nomor 1, (Desember 2019).
- Mukarom, Zaenal. 2008. *Perempuan dan Politik : Studi Komunikasi Politik tentang Keterwakilan Perempuan di Legislatif*, *MEDIATOR*, Volume 9 Nomor 2, (Desember 2008).
- Nawisa, dkk. 2022. *Implementasi 30% Keterwakilan Perempuan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Di Kota Makassar*. *Journal of Lex Generalis (JLS)*, Volume 3 Nomor 2, (Februari 2022).
- Pasaribu, P. 2017. *Peranan Partai Politik dalam Melaksanakan Pendidikan Politik*: *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, Volume 5 Nomor 1, 51-59 (Oktober 2017).
- Sitepu, E. 2016. *Peranan Partai Politik dalam Memberikan Pendidikan Politik yang Berkarakter Terhadap Masyarakat*: *Jurnal Ilmiah Research Sains*, Volume 2 Nomor 1, 1-8 (Januari 2016).
- Wardhani, Perdana, dkk. 2021. *Keterwakilan Perempuan dalam Keanggotaan Legislatif di Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah Periode 2019-2024*, *Jurnal Kebijakan Pemerintah*, Volume 4 Nomor 1, 14-22 (2021).

A. Sumber-Sumber Lain

- Badan Pusat Statistik, "Kependudukan", dalam <http://www.bps.go.id/> (diakses pada 30 Agustus 2022)
- Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* dalam [https://www.google.co.id/books/edition/Metodologi_penelitian_kualitatif/59V8DwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Johan+setiawan,+Metodologi+Penelitian+Kualitatif.+\(Sukabumi:+CV+Jejak,+2018\).&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Metodologi_penelitian_kualitatif/59V8DwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Johan+setiawan,+Metodologi+Penelitian+Kualitatif.+(Sukabumi:+CV+Jejak,+2018).&printsec=frontcover)
- Mudiyati Rahmatunnisa, Makalah Online: *Pentingnya Partisipasi Perempuan dan Prakteknya di Indonesia*, (Sumedang : Universitas Padjajaran), 2018 (<http://pustaka.unpad.ac.id/>)
- Portal Kabupaten Ngada, "Berita" dalam <https://portal.ngadakab.go.id/kpud-ngada-tetapkan-25-anggota-dprd-ngada-terpilih/> (diakses pada 30 Agustus 2022)
- Riyan Setiawan, "Isi Kursi DPR 2019-2024, Porsi Perempuan Meningkat", dalam <https://tirto.id/isi-kursi-dpr-2019-2024-porsi-perempuan-meningkat-ehHG> (diakses pada 27 Agustus 2022)
- UU No 7 Tahun 2017
(<https://www.mkri.id/public/content/pemilu/UU/UU%20No.7%20Tahun%202017.pdf>)